

# PERBANDINGAN MODEL KEPEMIMPINAN ISLAM DI NEGARA-NEGARA MUSLIM: STUDI KASUS TURKI, ARAB SAUDI, DAN BRUNEI DARUSSALAM

Anya Dani Kinasih \*<sup>1</sup>  
Norhidayah <sup>2</sup>  
Ahmadi <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prgram Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Palangka Raya

\*e-mail: [anyadanikinasih2211110127@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:anyadanikinasih2211110127@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>1</sup>, [norhidayah2211110033@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:norhidayah2211110033@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Penelitian ini membandingkan model kepemimpinan Islam yang diterapkan di tiga negara Muslim, yaitu Turki, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam. Fokus utama adalah menganalisis ideologi, struktur pemerintahan, peran agama dalam politik, serta dampaknya terhadap masyarakat di masing-masing negara. Turki, dengan sistem republik sekuler, menunjukkan pendekatan moderat dengan integrasi simbolik nilai-nilai Islam dalam kebijakan. Arab Saudi mengadopsi monarki absolut berbasis Wahabi dengan penegakan hukum syariah yang ketat. Sementara itu, Brunei Darussalam menerapkan sistem monarki Islam dengan pendekatan harmonis antara hukum syariah dan kehidupan masyarakat melalui konsep "Negara Zikir". Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, dengan analisis isi terhadap literatur terkait. Hasil penelitian mengungkapkan variasi signifikan dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan modern, yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan politik masing-masing negara.

**Kata kunci:** *Kepemimpinan Islam, Turki, Arab Saudi, Brunei Darussalam*

## Abstract

This study compares the Islamic leadership models implemented in three Muslim countries, namely Turkey, Saudi Arabia and Brunei Darussalam. The main focus is to analyze the ideology, government structure, the role of religion in politics, and its impact on society in each country. Turkey, with a secular republic system, shows a moderate approach with symbolic integration of Islamic values in policy. Saudi Arabia adopts a Wahabi-based absolute monarchy with strict enforcement of sharia law. Meanwhile, Brunei Darussalam implements an Islamic monarchy system with a harmonious approach between sharia law and public life through the concept of "Negara Zikir". This research method uses a qualitative approach based on literature study, with content analysis of related literature. The results reveal significant variations in the application of Islamic values in modern governance, influenced by each country's history, culture and politics.

**Keywords:** *Islamic leadership, Turkey, Saudi Arabia, Brunei Darussalam*

## PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu aspek krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam konteks negara-negara Muslim. Dalam sejarah peradaban Islam, model kepemimpinan telah mengalami berbagai dinamika, mulai dari sistem khilafah, kerajaan, hingga bentuk pemerintahan modern. Nilai-nilai Islam telah menjadi landasan penting dalam pembentukan karakter kepemimpinan, baik secara normatif berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, maupun secara historis melalui praktik para khalifah dan pemimpin Muslim terdahulu. Namun, implementasi kepemimpinan Islam dalam konteks negara modern menunjukkan variasi yang mencerminkan perbedaan latar belakang sejarah, budaya, politik, dan sistem pemerintahan masing-masing negara. Dalam konteks yang lebih luas, kepemimpinan yang baik dalam masyarakat muslim tidak hanya dilihat dari aspek spiritual, tetapi juga dari bagaimana pemimpin dapat mengelola organisasi atau komunitas dengan berkeadilan dan beretika, dengan tekanan kolaborasi sosial sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan (Solih & Ibrahim, 2023).

Turki, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam merupakan tiga negara Muslim yang menampilkan model kepemimpinan Islam yang berbeda secara signifikan. Turki dikenal dengan

sistem republik sekuler dengan pengaruh Islam yang moderat dalam pemerintahan, Kebijakan ini berupaya untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai sekuler dan norma-norma Islam, sebagaimana dijelaskan oleh berbagai analisis yang menunjukkan tantangan dalam menjalankan norma Muslim dalam kerangka hukum dan sosial (Millie & Hindasah, 2015). Arab Saudi menerapkan sistem monarki absolut yang berdasarkan pada pemahaman Wahabi terhadap Islam, Dalam konteks ini, sistem pemerintahan berfokus pada penerapan hukum syariah yang ketat dan sering kali dipandang sebagai penghalang terhadap modernisasi sosial dan politik. Penelitian menunjukkan bahwa sementara reformasi ekonomi di Arab Saudi mungkin ada, di bidang politik dan sosial, banyak perubahan bersifat permukaan yang tidak mengganggu dasar-dasar hukum syariah dan doktrin Wahhabisme (Mazaheri, 2013, Czornik, 2020)

Sementara Brunei Darussalam merupakan negara kecil dengan sistem monarki Islam yang menerapkan hukum syariah secara menyeluruh dalam aspek kehidupan kenegaraan. Berbeda dengan Arab Saudi, Brunei menonjolkan integrasi antara hukum syariah dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya, menyediakan kerangka yang lebih harmonis untuk integrasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola negara. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam menerapkan hukum syariah sebagai pedoman utama dalam kebijakan publik dan implementasi sosial (Razak et al., 2024). Dalam penelitian di Brunei, terlihat adanya upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan hukum yang lebih inklusif dan merangkul nilai-nilai budaya lokal (Husain et al., 2024) Perbedaan signifikan antara negara ketiga ini menggambarkan penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dan membuka ruang bagi analisis lebih lanjut mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat lebih lanjut terlibat dalam sistem pemerintahan yang beragam.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model kepemimpinan Islam yang diterapkan di ketiga negara tersebut, dengan meninjau dasar ideologi, struktur pemerintahan, peran agama dalam politik, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan membandingkan studi kasus dari ketiga negara ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai Islam diadaptasi dalam sistem pemerintahan modern, serta tantangan dan keunikan masing-masing model kepemimpinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian kepemimpinan Islam kontemporer dan memperluas wacana tentang hubungan antara agama dan negara dalam konteks dunia Muslim saat ini.

## **METODE**

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (*library research*). Metode ini digunakan untuk menelaah secara mendalam berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema kepemimpinan dalam Islam, khususnya dalam konteks negara-negara Muslim. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode content analysis atau analisis isi, dengan fokus pada teori-teori kepemimpinan Islam klasik dan kontemporer, serta aplikasinya dalam sistem pemerintahan yang diterapkan di Turki, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam.

Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menyusun simpulan-simpulan teoritis dan analitis yang menggambarkan secara sistematis perbandingan model kepemimpinan Islam di ketiga negara tersebut. Analisis dilakukan dengan memperhatikan aspek ideologis, struktural, serta peran agama dalam membentuk karakter kepemimpinan di masing-masing negara. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana kepemimpinan Islam yang kontekstual, serta menjadi referensi bagi pemikiran strategis dalam penerapan nilai-nilai syariah dalam tata kelola pemerintahan di dunia Muslim modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Artikel ini membahas perbandingan model kepemimpinan Islam di tiga negara Muslim, yaitu Turki, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam, menggunakan pendekatan yang menyangkut

konteks politik, sosial, dan ekonomi di masing-masing negara. Setiap negara tersebut memiliki karakteristik kepemimpinan yang unik yang dipengaruhi oleh sejarah, tradisi Islam, dan konteks geopolitik mereka. Berikut adalah pembahasan berdasarkan hasil analisis terhadap ketiga negara tersebut:

### 1. Model Kepemimpinan Islam di Turki

Turki menerapkan sistem pemerintahan republik sekuler yang di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk berupaya memisahkan agama dari negara. Namun, sejak awal tahun 2000-an, terlihat adanya tren re-Islamisasi, terutama di bawah pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdoğan. Meskipun masih terkendali dalam kerangka sekuler, Erdoğan secara aktif menekankan nilai-nilai moral Islam sebagai bagian dari identitas budaya dan politik nasionalisme Turki. Fenomena ini mencerminkan bagaimana pemimpin Turki menggunakan simbol-simbol Islam untuk memperkuat stabilitas nasional, meskipun secara formal tidak menjadikan syariat sebagai hukum negara (Nabiyyin, 2020; Yılmaz, 2021).

Kepemimpinan Erdoğan menampilkan ciri simbolik yang mempertahankan identitas Islam dalam kebijakan politik tanpa mengganti sistem hukum sekuler yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan tanpa mendominasi struktur hukum negara, menciptakan desain pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial (Yılmaz, 2021; Destradi et al., 2022; Dinç & Özdüzen, 2023). Hal ini mencerminkan model kepemimpinan Islam yang tidak terikat oleh syarat-syarat teologis yang ketat, memberikan ruang bagi negosiasi politik yang lebih luas dalam sistem yang sekuler. Di sisi lain, perlakuan terhadap berbagai kelompok etnis, seperti Kurdi, menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat berubah mengikuti kebutuhan politik, sementara retorika yang diusung seringkali mengedepankan populisme keagamaan yang mengedepankan perbedaan antara elit dan rakyat (Çay, 2022; Arifin & Saepudin, 2021).

### 2. Model Kepemimpinan Islam di Arab Saudi

Arab Saudi menerapkan sistem monarki absolut yang menempatkan raja sebagai kepala sekaligus kepala negara, termasuk sebagai pelindung dua kota suci, Mekkah dan Madinah. Sistem ini didasarkan pada hukum syariat Islam, dengan interpretasi Wahabi yang menjadi ideologi utama. Dalam praktiknya, ulama memegang peran krusial dalam mempengaruhi kebijakan negara, dan lembaga-lembaga keagamaan berfungsi sebagai bagian integral dari struktur kekuasaan. Undang-undang di negara ini tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan penegakan hukum yang sangat ketat, baik dalam konteks pidana maupun perdata, yang menunjukkan implementasi syariat yang menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari (Herman et al., 2024).

Konsep pemerintahan Arab Saudi dapat dilihat sebagai bentuk teokrasi Islam yang konservatif, di mana legitimasi politik saling terkait erat dengan legitimasi agama. Dalam sistem ini, kekuasaan tidak hanya berasal dari pengakuan politik tetapi juga dari aspek spiritual, menjadikan agama sebagai basis utama pemerintahan. Meskipun Arab Saudi memiliki unsur-unsur yang mengarah pada peningkatan dalam politik partisipasi, seperti pemilu tingkat kota yang diadakan pada tahun 2005, negara ini masih beroperasi dalam kerangka monarki absolut (Ahmad, 2018). Dengan demikian, transisi menuju demokrasi tetap menjadi tantangan, di mana sistem yang ada mengharuskan keseimbangan antara religiositas dan modernitas dalam praktik pemerintahan (Sunandar, 2017).

### 3. Model Kepemimpinan Islam di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan negara yang unik dalam konteks politik dan strukturnya, dikategorikan sebagai sebuah monarki absolut. Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut berdasarkan hukum Islam. Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh Sultan, yang

bertindak sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin tertinggi dalam urusan agama.

Sebagai monarki absolut, Brunei tidak memiliki badan legislatif yang berfungsi seperti negara-negara lain; semua keputusan penting diambil oleh Sultan. Ini terlihat jelas dari penguatan perundangan syariah yang diterapkan di negara ini, berbeda dengan negara-negara lain yang cenderung mengurangi pengaruh hukum Islam dalam struktur hukum mereka (Haqqi, 2022). Melalui konsep "Negara Zikir", yang diciptakan oleh Sultan, Brunei berusaha untuk mengintegrasikan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan bernegara, sebagai respons terhadap kondisi global yang semakin sekuler (Ahim, 2022; Haqqi, 2022).

Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri (Syaputra et al., 2023). Beliau telah menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam administrasi pemerintahan dan kehidupan sehari-hari rakyat Brunei (Ahim, 2022; Umma, 2022). Pemilihan sistem ini mencerminkan komitmen Brunei terhadap identitas sebagai "Kerajaan Islam Melayu" yang mengadopsi ideologi Melayu Islam Beraja (MIB) (Putra, 2023). Dalam aspek legalitas, Brunei mengadopsi sistem hukum yang menggabungkan hukum umum Inggris dengan hukum syariah, mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap konteks sosial dan budaya saat ini (Syaputra et al., 2023).

Dalam kajian ini, membahas perbandingan model kepemimpinan Islam di tiga negara Muslim, yaitu Turki, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam. Ketiganya memiliki sistem pemerintahan dan pendekatan terhadap Islam yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh sejarah, kondisi sosial-politik, serta ideologi masing-masing negara. Perbandingan ini penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam pemerintahan kontemporer dengan konteks yang berbeda. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut disajikan tabel perbandingan yang merangkum aspek-aspek utama dari model kepemimpinan Islam di ketiga negara tersebut:

<b>Aspek</b>	<b>Turki</b>	<b>Arab Saudi</b>	<b>Brunei Darussalam</b>
<b>Bentuk Pemerintahan</b>	Republik sekuler	Monarki absolut	Monarki absolut
<b>Pemimpin</b>	Presiden (Recep Tayyip Erdoğan)	Raja (Penjaga Dua Kota Suci)	Sultan (Hassanal Bolkiah)
<b>Pengaruh Islam dalam Negara</b>	Simbolik dan kultural (dalam politik dan identitas nasional)	Dominan dan menyeluruh (berbasis syariat Islam/Wahabi)	Menyeluruh dan terintegrasi melalui konsep Negara Zikir dan ideologi Melayu Islam Beraja (MIB)
<b>Sistem Hukum</b>	Sekuler (namun terdapat tren re-Islamisasi)	Syariat Islam sebagai dasar utama hukum negara	Kombinasi hukum umum Inggris dan hukum syariah
<b>Peran Ulama</b>	Terbatas dalam struktur negara	Sangat kuat, ulama memiliki pengaruh dalam kebijakan nasional	Tidak ada badan legislatif independen; Sultan sebagai pemegang otoritas agama tertinggi

Aspek	Turki	Arab Saudi	Brunei Darussalam
<b>Pendekatan terhadap Modernitas</b>	Integratif dan pragmatis (Islam dalam konteks nasionalisme modern)	Cenderung konservatif, namun mulai terbuka terhadap reformasi tertentu	Tradisional namun fleksibel, mengadaptasi nilai Islam dalam konteks globalisasi
<b>Kebijakan Sosial-Politik</b>	Populisme agama, retorika Islam untuk mobilisasi massa; responsif terhadap dinamika politik	Berbasis agama, hukum ditegakkan secara ketat; legitimasi berasal dari agama	Terpusat dan religius; segala kebijakan diatur oleh Sultan berdasarkan nilai Islam
<b>Karakteristik Kepemimpinan</b>	Adaptif, simbolik, dan populis	Teokratis, konservatif, dan sentralistik	Absolut, religius, dan ideologis
<b>Keterlibatan Rakyat</b>	Demokrasi prosedural dengan pengaruh agama dalam wacana publik	Terbatas; partisipasi rendah meskipun ada pemilu lokal	Sangat terbatas; semua keputusan ditentukan oleh Sultan

Tabel 1. Perbandingan Perbandingan Model Kepemimpinan Islam di Tiga Negara Muslim

Dari tabel perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun ketiga negara sama-sama beridentitas Muslim, implementasi nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan dan pemerintahan menunjukkan variasi yang signifikan. Turki menampilkan model kepemimpinan yang sekuler namun tetap memanfaatkan simbol-simbol Islam secara strategis; Arab Saudi menjalankan sistem teokratis yang berlandaskan syariat Islam secara ketat, sementara Brunei Darussalam mengintegrasikan Islam secara menyeluruh melalui konsep ideologis yang khas, yakni Melayu Islam Beraja. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana Islam sebagai dasar nilai dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan sejarah, budaya, dan dinamika politik masing-masing negara. Dengan memahami ragam pendekatan ini, kita dapat memperoleh wawasan lebih luas mengenai fleksibilitas serta tantangan dalam penerapan kepemimpinan Islam di berbagai belahan dunia Muslim saat ini.

## KESIMPULAN

Pembahasan di atas menyoroti perbedaan yang signifikan dalam model kepemimpinan Islam di Turki, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam. Setiap negara memiliki karakteristik unik yang menekankan adaptasi prinsip-prinsip Islam terhadap berbagai konteks sejarah, agama, dan politik. Dengan sistem republik sekuler, Turki mengintegrasikan ajaran Islam secara simbolis ke dalam pemerintahan nasional sembari memperkuat sistem hukumnya. Sebagai negara monarki absolut, Arab Saudi menjunjung tinggi syariah Islam secara ketat sesuai dengan interpretasi Wahabi, yang memandang agama sebagai sumber utama legitimasi politik. Melalui konsep "Negara Zikir", Brunei Darussalam menciptakan model pemerintahan yang inklusif dalam menegakkan prinsip-prinsip Islam sambil menyeimbangkan hukum syariah dengan kehidupan masyarakat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam tidaklah monolitik, melainkan bervariasi tergantung pada konteks lokal. Dalam konteks dunia Muslim modern, studi ini memberikan lebih banyak wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam bekerja.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahim, R. (2022). Falsafah pembangunan negara zikir memperteguh stabiliti konsep melayu islam beraja. *Ijus | International Journal of Umranc Studies*, 3(2), 59-69. <https://doi.org/10.59202/ijus.v3i2.528>
- Ahmad, F. (2018). Pemilihan umum dewan kota arab saudi 2005. *Nady Al-Adab*, 15(2), 10. <https://doi.org/10.20956/jna.v15i2.10613>
- Arifin, A. and Saepudin, D. (2021). Political and cultural islam: a historical phenomenon in indonesia. *Buletin Al-Turas*, 27(2), 345-360. <https://doi.org/10.15408/bat.v27i2.21137>
- Çay, F. (2022). Recep tayyip erdoğan's distinctive populist discourse: content analysis. *Istanbul Bilgi University*, 3(1), 201-222. <https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.65>
- Czornik, K. (2020). Saudi arabia as a regional power and an absolute monarchy undergoing reforms. *vision 2030 – the perspective of the end of the second decade of the 21st century. Przegląd Strategiczny*, (13), 179-198. <https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.11>
- Destradi, S., Plagemann, J., & Taş, H. (2022). Populism and the politicisation of foreign policy. *The British Journal of Politics and International Relations*, 24(3), 475-492. <https://doi.org/10.1177/13691481221075944>
- Dinç, P. and Özdüzen, Ö. (2023). From resolution to resecuritization: populist communication of the akp's kurkish peace process in turkey. *New Perspectives on Turkey*, 68, 71-94. <https://doi.org/10.1017/npt.2023.5>
- Haqqi, A. (2022). Perlaksanaan perundangan syariah dalam era kebawah duli yang maha mulia sultan haji hassanal bolkiah mu'izzaddin waddaulah: mercu tanda kegemilangan islam kontemporari. *Ijus | International Journal of Umranc Studies*, 2(2), 49-62. <https://doi.org/10.59202/ijus.v2i2.550>
- Herman, H., Kurniati, K., & Misbahuddin, M. (2024). Evolusi sistem pemerintahan arab saudi dari monarki absolut menuju demokrasi. *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 14-24. <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.313>
- Husain, S., Ayoub, N., & Hassmann, M. (2024). Legal pluralism in contemporary societies: dynamics of interaction between islamic law and secular civil law. *Syariat*, 1(1), 1-17. <https://doi.org/10.35335/cfb3wk76>
- Mazaheri, N. (2013). The saudi monarchy and economic familism in an era of business environment reforms. *Business and Politics*, 15(3), 295-321. <https://doi.org/10.1515/bap-2012-0039>
- Nabiyyin, M. (2020). Strategi pemerintahan erdogan dalam menghadapi ancaman politik dan militer suku kurdi 2015-2019. *Jurnal Icmes*, 4(1), 1-28. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i1.76>
- Putra, J. (2023). Melayu islam beraja dan implementasinya pada masa sultan hasanal bolkiah tahun 1984-2019. *H*, 17(2), 87-106. <https://doi.org/10.15548/h.v17i2.3634>
- Razak, M., Ismail, S., & Basir, S. (2024). Harmonizing faith and governance: a comprehensive study of islamic governance frameworks. *jpi*, 17(2), 87-101. <https://doi.org/10.53840/jpi.v17i2.304>
- Solih, M. and Ibrahim, M. B. B. (2023). Islamization of human knowledge (iohk) mediates the relationship between islamic spiritual intelligence (isi) and leadership competencies of student leaders (lcls). *International Journal of Education Humanities and Social Science*, 06(01), 289-303. <https://doi.org/10.54922/ijehss.2023.0492>
- Sunandar, M. (2017). Konsep agama dan sistem pemerintahan dalam perspektif islam. *Mizan Journal of Islamic Law*, 1(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.11>
- Syaputra, E., Asasriwarni, A., & Zulfan, Z. (2023). Religious jurisdiction system: a comparison in brunei darussalam and the philippines. *Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari Ah Dan Ahwal Al-Syakhsiiyah*, 6(1), 62. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.508>
- Umma, S. (2022). Otokrasi brunei darusslam: aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini. *Humanistika Jurnal Keislaman*, 8(1), 1-36. <https://doi.org/10.55210/humanistika.v8i1.728>
- Yılmaz, İ. (2021). The akp's authoritarian, islamist populism: carving out a new turkey. <https://doi.org/10.55271/op0005>